



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

TANTANGAN PELAKSANAAN VAKSINASI PMK

Masyithah Aulia Adhiem

Peneliti Ahli Pertama

masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Momentum menjelang Idul Adha kali ini dibayangi kekhawatiran kurangnya pasokan hewan kurban akibat penyakit mulut dan kuku (PMK). Kasus penyebaran PMK pada hewan ternak masih terus terjadi di berbagai wilayah. Data per 7 Juli 2022 menunjukkan bahwa sudah lebih dari 334.000 ekor hewan ternak yang tertular PMK dengan jumlah kematian lebih dari 2.000 ekor. Provinsi dengan kasus paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 134.996 kasus, diikuti NTB (49.879), Jawa Tengah (38.533), Aceh (34.223), dan Jawa Barat (33.210) (Tabel 1). Adapun NTT merupakan salah satu Provinsi yang tidak terkena wabah PMK sehingga NTT banyak mengirimkan hewan ternak yang akan digunakan dalam Idul Adha ke berbagai wilayah. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya menanggulangi wabah ini, salah satunya adalah vaksinasi hewan ternak.

Tabel 1. Lima Provinsi Teratas Kasus PMK

	Provinsi	Jumlah Hewan (ekor)	
		Sakit (sisa kasus/ belum sembuh)	Vaksinasi
1	Jawa Timur	134.996	215.028
2	Nusa Tenggara Barat	49.879	2.340
3	Jawa Tengah	38.533	53.496
4	Aceh	34.223	2.700
5	Jawa Barat	33.210	39.584

Data siagapmk.id per 7 Juli 2022 hewan ternak yang sudah divaksin sejumlah 395.998 ekor. Provinsi dengan jumlah ternak yang sudah divaksin terbanyak adalah Jawa Timur, yaitu sebanyak 215.028 ekor dan Jawa Timur juga adalah provinsi dengan jumlah ternak terjangkit PMK tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah dengan 53.496 ekor dan Provinsi Jawa Barat dengan 39.584 ekor yang sudah divaksin. Padahal pemerintah sudah mendatangkan vaksin PMK dari Perancis sebanyak 800.000 dosis dari 3.104.000 dosis yang dipesan.

Persoalan vaksinasi tidak berhenti pada kecukupan jumlah dosis saja. Banyak hal lain yang masih menjadi hambatan, seperti: (1) kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang memadai; (2) lokasi peternakan yang jauh di pelosok; (3) ukuran hewan ternak yang besar, misalnya sapi, membutuhkan personil tambahan untuk membantu proses vaksinasi; dan (4) sulitnya pencairan anggaran karena kendala birokrasi. Pemerintah daerah perlu secara jeli melihat permasalahan-permasalahan di lapangan dan mencari alternatif solusi agar vaksinasi PMK dapat berjalan. Untuk membantu mengatasi kurangnya jumlah tenaga kesehatan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Seperti yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan melibatkan kelompok peternak, penyuluh, dokter hewan, dan bahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Sementara itu, untuk mengatasi kendala anggaran, Kementerian Desa PDTT telah membuka wacana penggunaan Dana Desa untuk mengatasi PMK. Provinsi Banten akan dijadikan percontohan untuk mendapatkan model yang tepat pemanfaatan Dana Desa untuk mengatasi wabah PMK ini. Dalam pelaksanaan vaksinasi PMK, pendataan yang akurat hewan terkena PMK sangat penting. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha, karena jumlah hewan yang paling banyak tertular adalah sapi. Merosotnya jumlah stok sapi sebagai hewan kurban menyebabkan banyak daerah harus memasukkan stok dari daerah lain yang kasusnya masih rendah (zona kuning dan hijau). Untuk daerah dengan kasus tinggi (zona merah) tidak diperbolehkan melakukan lintas hewan ternak ke luar wilayahnya. Meskipun demikian, tetap ada risiko keluar-masuk hewan kurban melalui jalur ilegal, khususnya di wilayah transit dengan tujuan wilayah yang kekurangan stok hewan kurban. Lalu lintas hewan kurban ilegal dikhawatirkan akan meningkatkan risiko penularan PMK dan hal ini akan menyulitkan petugas dalam mendata secara tepat jumlah kebutuhan vaksin di wilayahnya. Wabah PMK pada sapi dan hewan ternak lainnya, meskipun kasus hewan yang terkena PMK dapat segera sembuh, namun jika tidak diatasi secara cepat maka akan mengancam produktivitas. Selain itu, juga mengancam plasma nutfah asli Indonesia yang penting untuk dilestarikan dan dijaga populasinya.

Atensi DPR

Pemerintah harus bergerak dengan lebih efisien lagi dalam melakukan penanganan wabah PMK. Kerja sama antarinstansi dan lembaga, serta antara Pusat dan Daerah menjadi salah satu kunci dalam kesuksesan penanganan wabah di seluruh wilayah. Terjadinya wabah ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Komisi IV karena jika tidak ditangani secara menyeluruh dapat mengancam populasi hewan, khususnya spesies yang merupakan plasma nutfah asli Indonesia. Komisi IV dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa anggaran untuk pengadaan vaksin telah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, juga perlu dilakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap distribusi vaksin di seluruh wilayah yang terjangkau, khususnya di wilayah pelosok yang sulit terjangkau, baik jumlah vaksin yang tersedia dan juga ketersediaan tenaga kesehatan. Pendataan juga menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk memastikan bahwa vaksin digunakan secara cepat dan tepat sehingga dapat terus menurunkan kasus aktif dan laju penularan. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait perlu melakukan pembaruan data secara berkala sebagai dasar pelaksanaan vaksinasi PMK.

Sumber

Bisnis Indonesia, 5 Juli 2022;
Kompas, 4,5,6, dan 7 Juli 2022;
Media Indonesia, 5 Juli 2022;
Republika, 5 Juli 2022;
siagapmk.id, 7 Juli 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://www.instagram.com/puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.